

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESA KECAMATAN SUPPA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PINRANG**



BOSOWA

Oleh

HUSRIANI

4594021070 / 9941110510081

Diajukan dalam rangka ujian Tugas Akhir
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
pada

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1999

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PINRANG**

OLEH:

HUSRIANI

4594021070 / 9941110510081

Diajukan dalam rangka ujian Tugas Akhir
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG
1999**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di
Kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang

Nama Mahasiswa : Husriani

Stb/Nirm : 45 94 021 070 / 994 111051 0081


Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

UNIVERSITAS
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. A. R. TAHIR, MS



Dra. JUHARNI

Mengetahui,

Dekan
Fisipol Universitas "45"

Ketua Jurusan Ilmu Adm.
Fisipol Universitas "45"


DRS. HUSAIN HAMKA, MS
Nip. 130 935 970


DRS. MARTEN D. PALOBO
Nik. D. 45 01 03

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Sabtu tanggal dua puluh dua bulan Mei 1999, skripsi :

Atas nama : HUSRIANI
Stb/Nirm : 45 94 021 070 / 994 111051 0081
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

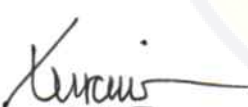
Telah diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Administrasi Program Studi, Ilmu Administrasi Negara.

Pengawas Umum,




DR. ANDI JAYA SOSE, SE. MBA
REKTOR UNIVERSITAS "45"


DRS. HUSAIN HAMKA, MS
DEKAN FISIPOL UNIV. "45"






DRA. NURMI NONCI
KETUA




DRS. MARTEN D. PALOBO
SEKRETARIS

Tim Penguji,

1. Drs. Husain Hamka, MS
2. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS
3. Drs. H. A.R. Tahir, MS
4. Drs. M. Ridwan Iskandar


.....)

.....)

.....)

.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas petunjuk dan izin-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Waktu perkuliahan yang cukup panjang dan melelahkan telah meninggalkan berbagai kesan suka dan duka bagi penulis yang tidak mudah terlupakan. Dimasa perkuliahan sampai lahirnya karya tulis ini penulis mengalami berbagai tantangan dan hambatan, tetapi berkat ketabahan, ketekunan serta keinginan untuk maju, ditambah bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, maka semuanya teratasi dengan baik. Sebab itu penulis menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas " 45 ".
2. Bapak Drs. Marten Palobo selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas " 45 ".
3. Bapak Drs. H. A. R. Tahir, MS selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Juharni selaku pembimbing II, atas budi baik serta kerelaan hati membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada umumnya dan Dosen Ilmu Administrasi pada khususnya, yang selama ini rela menyumbangkan pengetahuannya pada penulis.
5. Seluruh pegawai (karyawan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah turut membantu menyelesaikan kepentingan administrasi penulis selama menjadi mahasiswa.

6. Saudara seperjuangan semasa mahasiswa pada jurusan Ilmu Administrasi H. Suknawati, Hapsa, A. Herianti, Atia Leurima, dan rekan sepondok Herniati, Sulfaida, Anwar, A. abbas, Iful, Unding, Dadang, Iwan, Mashuri, Ucok, Adi, Agus serta yang tidak sempat disebutkan namanya, yang kesemuanya telah banyak memberikan bantuan moril dalam rangka penyelesaian studi penulis.
7. Kedua orang tua tercinta : Ayahanda Muh. Ali Toaha, ibunda Utariani, serta adik-adik tercinta Erwin, Haedar, Rani, yang selama ini dengan setia memberikan perhatian dan bantuan yang tidak ternilai harganya di dalam menyelesaikan simbol kemahasiswaan penulis pada jenjang Strata Satu (SI).

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin menghadirkan karya tulis terbaik, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kakurangan dan kehilafan, maka di dalam skripsi ini tentunya masih terdapat berbagai kekurangan. Sebab itu penulis mengharapkan masukan atau kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang berguna untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi siapa saja yang memerlukannya, aamiin.

Ujung Pandang, Maret 1999

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Partisipasi	15
B. Pengertian Pembangunan Masyarakat Desa	16
C. Tujuan Pembangunan Masyarakat Desa	20
D. Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Pembangunan Desa	21

BAB III : GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUPPA.....	24
A. Keadaan Geografi	24
B. Keadaan Demografi	28
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Desa ..	45
B. Bentuk Partisipasi Yang Menonjol Dalam Pembangunan Di Kecamatan Suppa	48
C. Faktor-faktor yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	54
D. Langkah-langkah yang Ditempuh Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	59
BAB V : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Wilayah Tiap Desa/Kelurahan dan Jumlah Lingkungan/dusun di Kecamatan Suppa Tahun 1998	25
2. Jenis Penggunaan Tanah di Kecamatan Suppa Tahun 1998	27
3. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Suppa Tahun 1998	30
4. Penyebaran Penduduk Tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Suppa Tahun 1998	31
5. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Suppa Tahun 1998	33
6. Jenis dan Luas Areal Lahan Pertanian di Kecamatan Suppa Tahun 1998	35
7. Produksi Padi di Kecamatan Suppa	36
8. Keadaan Luas Panen Padi Tahun 1998 di Kecamatan Suppa	36
9. Produksi Palawija Tahun 1998 di Kecamatan Suppa	37
10. Produksi Perikanan Menurut Sumbernya di Kecamatan Suppa ...	38
11. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kecamatan Suppa Tahun 1998	41
12. Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Suppa Tahun 1998	42
13. Jenis dan Jumlah Tempat Peribadatan di Kecamatan Suppa Tahun 1998.....	43
14. Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	47
15. Bentuk Partisipasi Masyarakat Yang Menonjol dalam Pembangunan di Kecamatan Suppa	50

16.	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	51
17.	Tanggapan Responden Tentang Animo Masyarakat dalam Partisipasi Pembangunan	53
18.	Tanggapan Responden Tentang Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	54



A B S T R A K

Dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka dilaksanakan pembangunan menyeluruh di seluruh penjuru tanah air Indonesia dalam rangka menuju masyarakat yang dicita-citakan, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang benar-benar dapat menjadi sarana perwujudan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka pelaksanaan pembangunan bukan hanya dilakukan di daerah perkotaan, tetapi juga dilaksanakan sampai ke daerah pedesaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia ini, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh rakyat harus berpartisipasi secara aktif dan maksimal dalam pembangunan yang didasarkan atas swadaya masyarakat itu sendiri.

Oleh karena pembangunan pada dasarnya merupakan imbalan kewajiban yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat, maka dalam usaha pembangunan, pemerintah berkewajiban memberikan pengarah dan bantuan kepada masyarakat agar semakin mampu melaksanakan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan dengan itulah, dalam kaitannya dengan upaya untuk melaksanakan pembangunan desa sebagaimana yang diharapkan, serta dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,

diberikanlah setiap desa berupa Inpres Bantuan Pembangunan Desa sejak Repelita Ketiga, termasuk desa-desa dan kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang yang terutama dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam wilayah yang bersangkutan.

Inpres Bantuan Pembangunan Desa yang diberikan kepada setiap desa atau kelurahan dalam wilayah Kecamatan Suppa sejak Repelita Ketiga, telah berhasil dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat, maupun dalam melengkapi berbagai prasarana untuk setiap desa dan kelurahan sebagai penunjang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang dihadapi, dan masalah-masalah tersebut sebagian telah ditanggulangi dan sebagian lainnya masih tetap berlangsung dan terus diusahakan pemecahannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu tidak lain untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, baik materil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaannya pemerintah menetapkan tahapan-tahapan, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Dimana dalam setiap Repelita mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan landasan yang kuat untuk tahapan pembangunan berikutnya.

Berdasarkan tahapan pembangunan yang telah dicapai sejak Repelita I sampai sekarang, maka bangsa Indonesia telah bertekad untuk mempercepat tercapainya sasaran utama jangka panjang yaitu tercapainya landasan bagi Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Landasan yang kuat tersebut meliputi Ekonomi, Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya, Politik dan Pertahanan Keamanan, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Untuk menciptakan kerangka landasan sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN, yaitu diusahakan terciptanya kondisi nasioanal yang stabil untuk kelancaran pembangunan. Dalam Repelita V pembangunan mempunyai arti yang sangat penting

bagi Bangsa Indonesia dimasa mendatang, sebab akan memberi arah bagi perjalanan bangsa kita dalam Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap Kedua dalam era tinggal landas, dimana era kebangkitan bangsa Indonesia tahap kedua akan sampai.

Pentingnya Repelita Kelima ditandai dengan menciptakan kerangka landasan yang kuat guna dimantapkan dalam Repelita Keenam, agar bangsa Indonesia benar-benar memasuki era tinggal landas, yang dapat membangun di atas kekuatan dan kemampuan sendiri, serta sedikit demi sedikit dapat melepaskan diri dari ketergantungan dengan pihak luar. Dengan demikian jelas terlihat bahwa pembangunan dimasa Repelita Kelima ini sungguh berat bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia, baik yang berada di kota maupun di desa, yang disebabkan oleh perkembangan globalisasi yang semakin cepat melanda dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sejalan dengan tujuan pokok pembangunan yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat seluruh Indonesia, maka implikasinya dari sudut tanggung jawab adalah bahwa seluruh masyarakat Indonesia, dari pemerintahan sampai masyarakat itu sendiri sebagai obyek pembangunan, bertanggung jawab atas kelancaran dan suksesnya pembangunan. Ini berarti bahwa pemerintah dan seluruh masyarakat secara aktif terlibat dalam setiap proses pembangunan.

Dalam rangka menciptakan kerangka landasan sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN tersebut, perlu diusahakan terciptanya kondisi nasional yang memberikan rangsangan serta peluang seluas-luasnya bagi semua potensi

pembangunan untuk berpartisipasi dalam usaha pembangunan nasional dengan mengusahakan keseimbangan dan keserasian pembangunan di berbagai bidang, agar pembangunan lebih merata di seluruh tanah air, untuk itu pemerintah memberikan bantuan terhadap pembangunan desa.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, maka partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting, sebab tanpa dukungan dari seluruh masyarakat, maka setiap kebijaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah, sudah barang tentu tidak dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Untuk itu, kesadaran masyarakat sangat diharapkan untuk turut aktif dalam setiap pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Perlu diketahui bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, sebab merupakan kunci pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Dilain pihak, proses pembangunan itu dapat juga menimbulkan perluasan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo, (1985 : 225) dijelaskan sebagai berikut :

“... Dilain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi, misalnya dengan pembangunan diharapkan terjadi perluasan kesempatan kerja, dan adanya kesempatan, kesediaan dan kemampuan bekerja anggota masyarakat di dalamnya, adalah bentuk partisipasi yang paling besar “

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa proses pembangunan itu tidak hanya memerlukan partisipasi masyarakat, namun sekarang ini yang menjadi masalah

adalah bagaimana implementasinya, yaitu ada atau tidaknya partisipasi masyarakat secara sukarela dan bergairah dalam pembangunan serta bagaimana menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan, sebab partisipasi masyarakat bukan hanya terbatas dalam pelaksanaan pembangunan, melainkan juga dalam proses perencanaan dan pengawasannya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti yang terlihat dalam pelita IV yaitu :

- a. Secara bertahap membebaskan desa dari keterpencilan dengan pembangunan prasarana perhubungan yang dapat memperlancar hubungan desa dengan desa, kecamatan, dan dengan kota.
- b. Menata kembali daerah yang terlalu padat penduduknya.
- c. Meningkatkan mutu aparatur pemerintah agar mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan bagi kelancaran pembangunan, khususnya pembangunan daerah serta dapat mendorong penduduk untuk berprakarsa dalam pembangunan atau menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan.
- d. Menggerakkan koordinasi terhadap semua program pembangunan daerah.
- e. Memberikan bantuan terhadap pembangunan daerah untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat.

Namun demikian telah berbagai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang ditempuh tetapi kenyataannya sekarang ini masalah-masalah yang dihadapi desa, perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga-lembaga yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat belum berkembang sebagaimana yang diharapkan.
- b. Tingkat kesadaran dan keterampilan penduduk belum memadai, menyebabkan produktifitas dan pendapatan masyarakat masih rendah.

Dari berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan desa/kelurahan seperti diuraikan di atas, maka terdoronglah penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul :

“ Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang “.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Seperti diketahui bahwa pembangunan itu tidak lain adalah suatu usaha yang dilaksanakan secara sadar dalam rangka pertumbuhan penduduk dan perubahan yang terencana. Oleh karena itu pembangunan berarti menentukan suatu masa depan dengan proses perubahan dari keadaan yang kurang baik ke keadaan yang lebih baik. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, teratur dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu ada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang lebih sistematis.

Proses pembangunan desa yang dilaksanakan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh berbagai masalah, seperti masalah ekonomi

dan masalah sosial. Sedangkan dari segi pelaksanaannya, masih kurangnya tenaga terampil serta tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan masih rendah.

Mengingat banyaknya masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, Kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, maka untuk lebih sistematisnya penyusunan skripsi ini perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti.

Adapun masalah-masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, Kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembangunan?
3. Langkah-langkah apa yang ditempuh dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa Kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan informasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan terhadap pembangunan desa.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan di perpustakaan dan menjadi bahan informasi bagi yang memerlukannya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan di daerah-daerah. Untuk mencapai usaha tersebut, pemerintah mengambil kebijaksanaan Inpres Bantuan Desa yang diberikan kepada daerah-daerah pada setiap tahun anggaran. Kebijakan tersebut dimulai pada Repelita pertama. Tujuan pemberian bantuan tersebut kepada desa adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena terpenuhinya kebutuhan mereka dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana.

Selain tujuan pemberian Inpres tersebut, juga ditujukan untuk merangsang masyarakat turut serta dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan, sehingga ia tidak hanya sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek pembangunan.

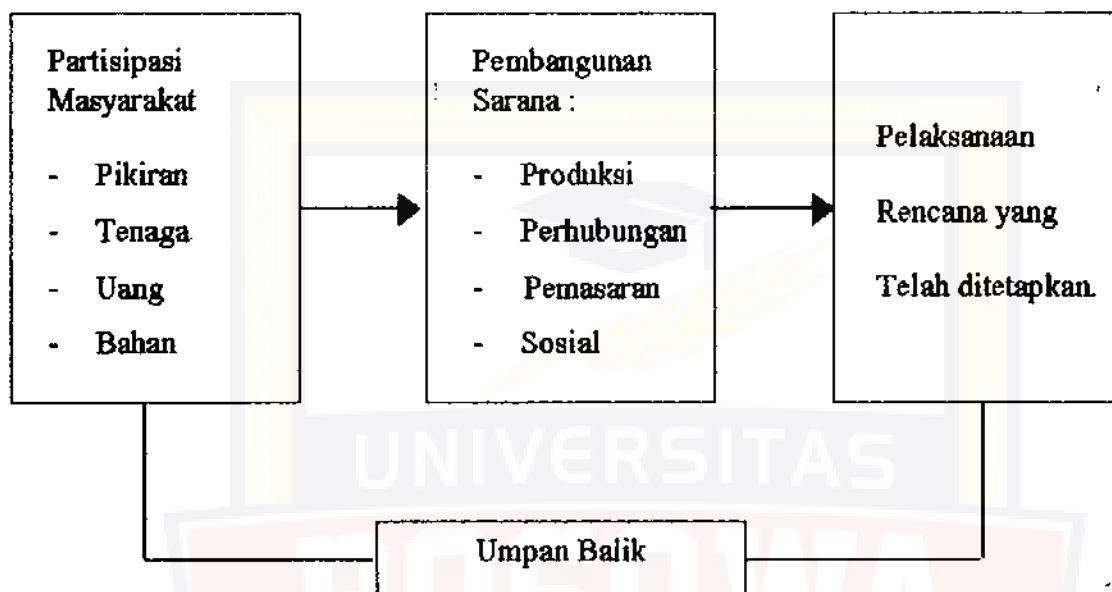
Untuk nilai-nilai atau lembaga-lembaga di dalam masyarakat perlu didorong agar dapat bernilai positif terhadap kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat I. Nyoman Beratha, (1982 : 71) menjelaskan bahwa :

“ Institusi-institusi kemasyarakatan seperti gotong royong, pemufakatan, pemusyawaratan dan lain sebagainya yang hidup dalam masyarakat perlu diperiksa dengan seksama untuk akhirnya nilai-nilai positif dari institusi itu dapat berkembang untuk kehidupan nasional pada umumnya.”

Dari uraian tersebut nampak jelas bahwa pembangunan itu dapat berjalan lancar apabila didukung oleh segenap lapisan masyarakat, maka apapun alasannya yang dikemukakan dan kita mendefinisikan pembangunan itu dan jika diteliti akan jelas bahwa masyarakat yang sedang membangun ditandai adanya suatu proses perubahan yang teratur dan berorientasi ke masa depan. Pembangunan ini harus dapat diartikan sebagai perbaikan dalam berbagai lapangan hidup dan kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat membawa akibat terjadinya pembaharuan, baik sebagian maupun secara keseluruhan yang harus dilaksanakan secara sistematis, ini berarti bahwa pembangunan itu tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, karena merupakan obyek dan subyek pembangunan, yang berarti disamping harus mampu ikut serta dalam melaksanakan pembangunan, juga harus dapat menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri.

Dalam menggerakkan atau mendorong partisipasi atau swadaya masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan penuh rasa tanggung jawab, karena tanpa keterlibatan masyarakat secara maksimal dalam pembangunan, maka pembangunan tidak mungkin dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada masyarakat agar memberikan partisipasinya. Untuk lebih jelasnya bagaimana pemerintah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan

bagaimana masyarakat memberikan partisipasinya, dapat dilihat pada gambaran skema konseptual sebagai berikut :



Dari gambaran diagram tersebut di atas, nampak bahwa pemerintah dalam era pembangunan dewasa ini, dalam upaya merangsang masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan, maka disiapkan berbagai sarana-sarana pembangunan agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

E. Metode Penelitian

Dalam proses pembuatan skripsi ini, seperti penyusunan skripsi lainnya, maka tentunya diperlukan metode penelitian guna memperoleh data yang sifatnya faktual dan tingkat validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, maka skripsi ini diharapkan dapat mendekati objektivitasnya penulisan ilmiah.

Adapun penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe dan dasar penelitian

a. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai permasalahan yang telah diteliti.

b. Dasar penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survei, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden melalui wawancara.

2. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi (pengamatan), yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dengan menggunakan teknik observasi ini, berarti untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung yang ada hubungannya dengan skripsi ini, dalam wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang. Objek yang dimaksud, yaitu sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, maupun hal-hal lainnya yang dianggap perlu dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan dalam wilayah tersebut. Penggunaan teknik pengumpulan data seperti ini,*

Adapun penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe dan dasar penelitian

a. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai permasalahan yang telah diteliti.

b. Dasar penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survei, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden melalui wawancara.

2. Teknik pengumpulan data

a. Observasi (pengamatan), yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dengan menggunakan teknik observasi ini, berarti untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung yang ada hubungannya dengan skripsi ini, dalam wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang. Objek yang dimaksud, yaitu sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, maupun hal-hal lainnya yang dianggap perlu dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan dalam wilayah tersebut. Penggunaan teknik pengumpulan data seperti ini,

terutama dimaksudkan agar pembahasan atau analisis yang digunakan dalam skripsi ini benar-benar bersifat obyektif dan faktual.

Daerah penelitian mencakup empat desa dari sepuluh desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Suppa. Keempat desa yang dimaksud adalah Kelurahan Watang Suppa, Desa Lero, Desa Tasiwalie, dan Desa Maritengae.

- b. Wawancara (interview), yaitu penulis mengadakan wawancara langsung kepada responden yang dianggap lebih mengetahui masalah yang diteliti, khususnya pembangunan desa. Untuk itu, dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan, penulis mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun anggota masyarakat tertentu, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang setidak-tidaknya dapat memberikan penjelasan serta saran dalam melengkapi data atau bahan penyusunan skripsi ini.

Penggunaan teknik pengumpulan data berdasarkan pengumpulan metode penelitian seperti tersebut di atas dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas tentang objek penelitian, maupun dalam rangka penentuan atau perumusan kesimpulan terhadap objek penelitian yang bersangkutan.

- c. Angket/Kusioner adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mengedarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden yang terlebih dahulu ditentukan melalui penarikan sampel.

3. *Populasi dan sampel*

a. *Populasi*

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah empat desa yang ada di Kecamatan Suppa Daerah Tingkat II Pinrang dari sepuluh desa/kelurahan yang ada, yaitu Kelurahan Watang Suppa, Desa Lero, Desa Tasiwalie, dan Desa Maritengae.

b. *Sampel*

Jenis dan jumlah responden yang dipilih sebagai sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling, dimana jenis sampel yang dipilih disesuaikan dengan keterlibatannya. Adapun yang menjadi sampel responden dalam penelitian ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat setiap Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Suppa sebanyak 35 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- Kelurahan Watang Suppa sebanyak 9 orang terdiri atas :

Tokoh Tani 2 orang

Tokoh Adat 3 orang

Tokoh Pendidik 2 orang

Tokoh Agama 2 orang

- Desa Maritengae sebanyak 8 orang terdiri atas :

Tokoh Tani 2 orang

Tokoh Adat 2 orang

Tokoh Pendidik 2 orang

Tokoh Agama 2 orang

- Desa Lero sebanyak 9 orang terdiri atas :

Tokoh Tani 2 orang

Tokoh Adat 3 orang

Tokoh Pendidik 2 orang

Tokoh Agama 2 orang

- Desa Tasiwalie sebanyak 9 orang terdiri atas :

Tokoh Tani 2 orang

Tokoh Adat 3 orang

Tokoh Pendidik 2 orang

Tokoh Agama 2 orang

Jumlah sampel responden keseluruhan adalah 35 orang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dari responden mula-mula diklasifikasikan dan diedit, kemudian diberikan kode dan selanjutnya disusun dalam bentuk tabel-tabel frekwensi atau prosentase agar mudah dianalisis secara kualitatif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup pembahasan skripsi ini, maka disusun sistematika pembahasan dalam 5 (lima) Bab sebagai berikut :

Bab Pertama, yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang beberapa pengertian, tujuan dan sasaran pembangunan desa, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Bab Ketiga, yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang memuat keadaan Geografis, dan keadaan Demografis Kecamatan Suppa.

Bab Keempat, yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan.

Bab Kelima, yaitu Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Partisipasi

Kata “partisipasi” berasal dari bahasa asing, yaitu *participation* yang berarti pengikutsertaan pihak lain. Namun demikian, pengertian partisipasi yang lebih jelas seperti yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamijoyo, (1985 : 224) mengemukakan bahwa :

Pada dasarnya gotong royong tersebut berdasarkan kesukarelaan, saling membantu bekerja untuk sesuatu kepentingan sebagian anggota atau kepentingan seluruh anggota masyarakat. Ikatan kemasyarakatannya adalah berdasarkan ikatan tempat ataupun berdasar dari suatu ikatan tradisional lain. Ia menjadi mobilisasi apabila terdapat kekuatan eksteren yang menggerakkan untuk kegiatan tertentu (mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri) atau suatu pekerjaan dengan cara gotong royong.

Selain dari pengertian tersebut, pengertian partisipasi juga terdapat dalam Diktat Bunga Rampai Administrasi pembangunan yang dikemukakan oleh M. Syukur Abdullah, (1987 : 76) menjelaskan bahwa :

“ Partisipasi adalah sikap tanggap masyarakat lokal (*lokal response*) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara-cara baru pemakaian teknologi dan kesediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu, tenaga, dan uang untuk tercapainya tujuan pembangunan.”

Dari uraian tersebut nampak bahwa partisipasi itu tidak lain adalah sikap masyarakat. Bila dikaitkan dengan proses pembangunan, maka sikap masyarakat

terhadap setiap pembangunan yang dilaksanakan, adalah masyarakat itu secara sukarela turut serta di dalamnya. Dengan demikian bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya dalam satu jenis kegiatan tertentu, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan. Ini berarti bahwa peranan partisipasi masyarakat sangat menentukan kelancaran dan suksesnya pembangunan sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat harus secara terus menerus digerakkan hingga suatu tingkat yang maksimal.

B. Pengertian Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu. Perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya inilah yang disebut pembangunan.

Pembangunan nasional suatu bangsa sebenarnya merupakan suatu usaha rakyatnya dari bangsa tersebut untuk mencapai kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyatnya. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan suatu langkah atau tindakan untuk memperbaharui kehidupan nasional. Untuk memberikan pengertian yang lebih mendasar tentang arti serta makna pembangunan itu, maka ada baiknya kita tinjau beberapa batasan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut T. R. Batten dalam bukunya I. Nyoman Baratha, (1985 : 36) menjelaskan bahwa :

“ Pembangunan itu adalah suatu proses dimana orang-orang atau masyarakat desa mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan memenuhi keinginan tersebut .“

Agar suatu pembangunan berjalan sukses dan lancar, maka momentum yang timbul dari gerak pertama digunakan untuk mengerakkan usaha lain. Disamping itu, dalam pembangunan ini pun kita harus bekerja secara bertahap. Kita mulai dengan hal-hal yang sudah dikenal di daerah itu, kemudian meningkat kepada hal-hal yang lebih modern, setelah usaha pertama mencapai sukses.

Menurut Prof. Dr. S. P Siagian, MPA, (1982 : 1-2) menjelaskan bahwa :

“ Pembangunan adalah suatu usaha rangkaian pertumbuhan pembangunan yang berencana sadar oleh suatu bangsa atau negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa”.

Apabila pengertian tersebut di atas dianalisa lebih lanjut, maka akan terlihat beberapa pengertian pokok yang sangat penting diperhatikan yaitu :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang berarti dalam suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan.
- b. Pembangunan merupakan suatu usaha secara sadar dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilaksanakan secara berencana dan berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- d. Pembangunan itu ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Rumusan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang disebut pembangunan apabila dalam dirinya tercakup unsur proses yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus. Proses pembangunan yang dimaksud dapat dibagi atas tahap-tahap tertentu yang tidak berdiri sendiri. Tahap-

tahap pembangunan ini dapat dibuat berdasarkan sasaran tertentu, sumber pembiayaan tertentu, hasil-hasil tertentu dan sebagainya.

Oleh karena pembangunan merupakan perwujudan dari sifat hakekat manusia yang menginginkan perkembangan, maka berarti bahwa pembangunan juga merupakan usaha sadar dari bangsa atau masyarakat bersangkutan, sehingga dengan demikian jika dalam masyarakat terdapat suatu kegiatan yang nampak seperti pembangunan, akan tetapi yang timbul hanya secara insidental, maka keadaan atau kegiatan yang demikian tidak dapat digolongkan dalam kategori pembangunan.

Selain unsur-unsur atau ciri-ciri pembangunan seperti dikemukakan di atas, pembangunan juga ditandai dengan adanya proses modernitas yang berarti suatu cara hidup yang baru dan lebih baik daripada cara hidup sebelumnya, serta kemampuan untuk lebih menguasai alam sekitar dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk berdiri sendiri dan mengurangi sifat ketergantungan.

Modernisasi dalam proses pembangunan tersebut harus bersifat multi dimensional, sehingga dengan demikian pembangunan benar-benar merupakan proses perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bangsa yang bersangkutan.

Selanjutnya menurut MR. Soetomo S. Honggowongso, (1986 : 25) mengemukakan bahwa :

“ Istilah pembangunan masyarakat desa mula-mula hanya pembangunan masyarakat desa saja, sesuai dengan istilah asli asingnya Community Development. Rasa-rasanya yang asli Indonesia hanya D-nya saja (desa) sasaran dari pembangunan masyarakat desa (PMD), jadi Village Community Development, sebab istilah-istilah dilain negara pada umumnya hanya CD atau Rural CD, misalnya di Birma. Kemudian di Indonesia pada

akhir-akhir ini istilah pembangunan desa dimana dalam istilah desa sudah tercakup pengertian masyarakatnya.”

Pada pokoknya istilah-istilah seperti pembangunan masyarakat desa, modernisasi desa, pembangunan desa sebenarnya mengandung pengertian yang sama. Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN 1973 ditegaskan bahwa :

“ Peningkatan pembangunan masyarakat pedesaan akan mencegah derasnya perpindahan penduduk ke kota-kota besar. Disamping itu, perluasan kesempatan kerja khususnya antara lain pembangunan proyek padat karya di daerah pedesaan yang kenyataannya merupakan sumber-sumber tenaga kerja “

Pembangunan masyarakat desa sebagaimana dimaksudkan dalam GBHN tersebut di atas dimaksudkan untuk mempertinggi hasil usaha setiap anggota masyarakat desa yang berarti pula mempertinggi penghasilan dan tingkat kehidupan masyarakat desa itu sendiri.

Pembangunan masyarakat pedesaan menitikberatkan pada keinginan dan kesadaran masyarakat pedesaan dan pemerintah desa yang bersangkutan dengan menghidupkan dan memupuk, serta membimbing rakyat dengan berbagai usaha dan bantuan-bantuannya. Hal ini harus berpegang pada prinsipnya dan azas kekeluargaan yang diwujudkan dalam musyawarah dan mufakat.

Pembangunan masyarakat desa dapat dilaksanakan dengan baik apabila dilakukan atas usaha sadar dari masyarakat desa tersebut yang disertai dengan keinginan dan perhatian yang jelas.

C. Tujuan Pembangunan Masyarakat Desa

Tujuan pembangunan masyarakat desa setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan yang prinsipil dan fundamental dari pembangunan masyarakat desa di Indonesia adalah dalam jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya rakyat di desa. Sedangkan tujuan jangka panjang pembangunan masyarakat desa adalah identik dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam GBHN tahun 1973 : 25 dijelaskan, bahwa :

“ Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan damai dalam lingkungan pergaulan yang merdeka, tertib dan damai.”

Berdasarkan hal tersebut, nyatalah bahwa masyarakat desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembanguan nasional yang merupakan pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap, yaitu setiap lima tahun yang dituangkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita).

Tujuan setiap tahap pembangunan Repelita adalah sama yaitu :

- a. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.
- b. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya secara berkesinambungan.

Dengan tujuan ganda tersebut jelaslah bahwa dalam setiap pembangunan akan diusahakan agar rakyat segera dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan berupa kesejahteraan lahir dan batin sambil mempersiapkan tahap pembangunan berikutnya.

Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan tujuan utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat banyak.

D. Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Pembangunan Desa

Berbicara tentang kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pembangunan desa, maka dapat dikemukakan bahwa kebijaksanaan pemerintah dimaksud meliputi berbagai bidang. Hal ini dilakukan karena pembangunan nasional meliputi seluruh lapangan hidup masyarakat yang bersangkutan, serta harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa sebagai perbaikan tingkat hidup dan kesejahteraannya.

Kebijaksanaan pemerintah yang dimaksud, seperti dengan adanya penelitian yang seksama mengenai kedudukan setiap desa dalam kaitannya dengan pembangunan daerah. Ini berarti bahwa pemerintah berusaha untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan desa dalam pengembangan daerah secara menyeluruh dan dinamis, sehingga dapat menjadi bahan untuk penyusunan kebijaksanaan lebih lanjut.

Selain penelitian, salah satu kebijaksanaan pemerintah yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa yang akan diarahkan kepada usaha peningkatan produktifitas. Kebijaksanaan seperti tersebut dikaitkan dengan

memperhatikan mekanisme yang ada dan kehidupan masyarakat desa, yang dilandasi oleh suasana kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, kepercayaan, gotong royong, tata kerja tradisional dan sebagainya.

Selanjutnya ditetapkan pula kebijaksanaan lain, yaitu menstimulir lembaga-lembaga perkreditan desa untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dan menyesuaikan diri dengan tingkat kemampuan masyarakat desa pada umumnya.

Selain daripada itu, pemerintah juga menetapkan kebijaksanaan dengan mengusahakan bantuan material kepada masyarakat untuk menghimpun dan meningkatkan serta mengintensifkan cara kerja gotong royong yang diarahkan kepada usaha-usaha untuk menunjang suksesnya pembangunan, terutama guna melengkapi serta menyempurnakan sarana-sarana produksi, perhubungan dan prasarana desa lainnya. Bantuan tersebut tidak diperuntukkan bagi keperluan yang bersifat konsumtif, melainkan untuk membantu mendapatkan bahan-bahan yang tidak dapat diperoleh di pedesaan yang bersangkutan. Kebijaksanaan ini dikenal dengan bantuan pembangunan yang didasarkan atas Instruksi Presiden (Inpres) setiap tahun anggaran.

Kebijaksanaan lainnya yang merupakan kebijaksanaan yang sangat menentukan, yaitu mengaktifkan struktur Pemerintah Desa, yang dibarengi dengan lembaga-lembaga desa, sehingga dengan demikian dapat diwujudkan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan desa, yaitu antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan desa seperti dikemukakan di atas, maka untuk lebih jelasnya tentang kebijaksanaan ini, kiranya perlu pula dikemukakan perincian program pokok pelaksanaan pembangunan desa dalam bentuk kegiatan operasional, sebagai berikut :

1. Penelitian Desa.....
2. Unit Daerah Kerja PMD.....
3. Perlombaan Desa.....
4. Pendidikan dan Training.....
5. Mengefektifkan Lembaga-lembaga Desa.....
6. Bimbingan Usaha Masyarakat.....
7. Pengembangan Prasarana Masyarakat.....
8. Peningkatan Permodalan Desa.....
9. Resettlement Desa.....
10. Memberikan Bantuan Kepada Desa”
(Pusat latihan PMD, 1973 : 5-9)

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka jelas bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan suksesnya pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan desa, maka pemerintah telah menetapkan berbagai kebijaksanaan yang pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUPPA

A. Keadaan Geografisnya

Untuk memberikan gambaran tentang potensi wilayah Kecamatan Suppa dalam pembangunan, maka dalam bagian ini akan dikemukakan beberapa hal yang dianggap perlu mendapat perhatian termasuk faktor geografis. Oleh karena itulah, maka bab ini akan kami ketengahkan beberapa aspek geografis Kecamatan Suppa sebagai salah satu kecamatan dari sembilan wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Secara geografis Kecamatan Suppa ini merupakan daerah yang termasuk dalam dataran rendah dan bukit-bukit, sebab kecamatan ini hanya berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan air laut. Mengenai iklim di kecamatan ini, sepanjang tahun terjadi pergantian musim yaitu :

- Musim hujan pada bulan Nopember sampai April.
- Musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober.

Suhu udaranya berkisar antara 23 °C sampai dengan 32 °C, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Bulu dan Mattiro Sompe.
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kodya Pare-pare.
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang).

Kecamatan Suppa memiliki luas kurang lebih 74,20 Km² yang terdiri dari sembilan desa dan 1 (satu) kelurahan, 5 (lima) lingkungan, 26 (dua puluh enam) dusun, 62 (enam puluh dua) ORW, 138 (seratus tiga puluh delapan) ORT.

Pada tabel berikut ini, akan terlihat yang paling luas wilayahnya adalah desa Tellumpanua dengan luas wilayah kurang lebih 14,32 Km² dan yang paling sempit wilayahnya adalah desa Lero yakni 3,71 Km².

TABEL I
LUAS WILAYAH TIAP DESA / KELURAHAN
DAN JUMLAH LINGKUNGAN/DUSUN DI KECAMATAN SUPPA
TAHUN 1998

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Lingkungan/dusun
1.	Lero	3,71	2
2.	Tasiwalie	4,41	3
3.	Maritengae	6,96	3
4.	Watang Suppa	11,26	3
5.	Watang Pulu	5,94	3
6.	Wiring Tasi	4,56	2
7.	Lotang Salo	5,06	3
8.	Tellumpanua	14,32	2
9.	Ujung Labuang	3,87	2
10.	Polewali	14,11	3
J U M L A H		74,20	26

Sumber Data : Kantor Kecamatan Suppa, 1998

Wilayah kecamatan Suppa secara keseluruhan merupakan hamparan dataran rendah, yang hampir separuhnya dari wilayah hamparan tersebut adalah persawahan dan sebagian besar wilayahnya merupakan jenis tanah kering.

Dalam wilayah yang merupakan dataran rendah, juga terdapat beberapa daerah yang tanahnya cukup subur dan merupakan areal pertanian yang cukup luas pula. Hal tersebut merupakan salah satu potensi wilayah yang sangat menguntungkan dalam proses pembangunan, karena sangat penting artinya dalam mewujudkan ketahanan masyarakat di wilayah ini.

Selain sebagai areal pertanian, masih terdapat pula sebagian wilayah lainnya yang dimanfaatkan untuk tempat perkabunan, tempat pertambakan dan lain sebagainya, yang kesemuanya diarahkan kepada kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah tersebut.

Selain hasil pertanian yang berhasil dalam wilayah ini, yang mempunyai hasil produksi lebih besar per tahun yaitu produksi hasil perkebunan, perikanan dan peternakannya.

Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan tanah dalam wilayah di kecamatan Suppa, akan dikemukakan data seperti dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 2
JENIS PENGGUNAAN TANAH
DI KECAMATAN SUPPA TAHUN 1998

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Persawahan	1.518
2.	Tanah kering	5.902
3.	Tegalan	1.988
4.	Pekarangan	232
5.	Perkebunan	49
6.	Padang rumput	803
7.	Kolam tambak	1.379
8.	Lain-lain	1.391
LUAS TOTAL		1.096.178

Sumber Data : Kantor Kecamatan Suppa, 1998

Berdasarkan data penggunaan tanah seperti dikemukakan di atas, maka jelas bahwa areal pertanian di Kecamatan Suppa cukup luas, yang sangat besar artinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa yang dilaksanakan dalam wilayah yang bersangkutan.

Selanjutnya tentang keadaan iklim di Kecamatan Suppa pada dasarnya merupakan daerah yang beriklim tropis, namun menurut pembagian iklim yang dikemukakan oleh FH Schmidt dan YHA. Ferguson, bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang pada wilayah Kecamatan Suppa digolongkan ke dalam iklim Tipe C.

Di dalam wilayah yang mempunyai iklim seperti tersebut di atas, berlangsung dua jenis musim, masing-masing sekali dalam setahun, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan di daerah ini berlangsung sekitar bulan Nopember sampai dengan bulan April tahun berikutnya, sedangkan musim kemarau berlangsung bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Selama berlangsungnya musim kemarau terdapat beberapa bulan yang kering, yaitu antara tiga sampai empat setengah bulan.

Angin yang bertiup dalam musim kemarau tersebut dikenal dengan nama angin barubu yang kering dengan kecepatan yang tinggi, sehingga dapat mempercepat penguapan air tanah dalam wilayah yang bersangkutan.

B. Keadaan Demografi

Seperti halnya dengan faktor geografi yang telah diuraikan di atas, faktor lain yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan pembangunan adalah faktor demografi. Sehubungan dengan hal itu, pada bagian ini perlu kiranya dikemukakan beberapa aspek demografi di Kecamatan Suppa.

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Telah kita ketahui bahwa pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Ini berarti bahwa untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, maka seluruh lapangan hidup dan kehidupan manusia Indonesia harus dibangun secara bersama-sama, sehingga setiap manusia Indonesia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan.

Sebagai subjek pembangunan, maka setiap manusia Indonesia merupakan pelaksana pembangunan, dan sebagai objek pembangunan, maka setiap manusia Indonesia merupakan sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan merata sesuai azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari hal tersebut di atas, maka faktor penduduk merupakan potensi pembangunan yang sangat menentukan bagi kelancaran dan suksesnya pembangunan dalam wilayahnya masing-masing. Penduduk tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan, sehingga usaha bersama dari seluruh rakyat yang dapat dirasakan sebagai usaha nyata dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Untuk lebih jelasnya, tentang jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Suppa, akan dikemukakan data tentang penduduk seperti terlihat dalam tabel berikut :

TABEL 3
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT UMUR
DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN SUPPA TAHUN 1998

No.	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 - 4	1.488	1.660	3.198
2.	5 - 9	1.748	1.333	3.081
3.	10 - 14	1.490	1.684	3.174
4.	15 - 19	1.380	1.462	2.842
5.	20 - 24	907	1.808	2.715
6.	25 - 29	929	1.175	2.104
7.	30 - 34	706	871	1.577
8.	35 - 39	850	949	1.799
9.	40 - 44	553	677	1.230
10.	45 - 49	644	323	1.367
11.	50 - 54	446	515	961
12.	55 - 59	262	372	634
13.	60 Ke atas	873	1.645	2.518
JUMLAH		12.276	12.448	24.724

Sumber Data : Kantor Kecamatan Suppa, 1998

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut penggolongan umur dan jenis kelamin seperti dikemukakan dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dalam wilayah ini cukup besar, dan dapat pula kita lihat perbedaan jumlah kelompok laki-laki dan perempuan tidak begitu jauh berbeda, hanya terpaut sedikit saja yang mana kita dapat lihat pada data di atas bahwa kelompok laki-laki lebih sedikit dibanding kelompok umur perempuan. Bila ditinjau dari segi usia kerja, jumlah kelompok umur anak-anak dan remaja lebih besar dibanding kelompok usia kerja dan kelompok usia lanjut.

Penduduk yang cukup besar tersebut tersebar kedalam 10 (sepuluh) desa/ kelurahan seperti yang dikemukakan dalam uraian yang lalu. Untuk lebih jelasnya, penyebaran penduduk tiap desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4
PENYEBARAN PENDUDUK TIAP DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN SUPPA TAHUN 1998

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk/Jiwa	Keluarga
1.	Lero	3.831	1.174
2.	Tasiwalie	2.808	652
3.	Maritengae	2.123	479
4.	Watang Suppa	3.215	636
5.	Watang Pulu	2.199	502
6.	Wiring Tasi	2.002	468
7.	Lotang Salo	1.902	454
8.	Tellumpanua	2.185	482
9.	Ujung Labuang	1.879	379
10.	Polewali	2.580	557
J U M L A H		24.724	5.629

Sumber Data : Kantor Kecamatan Suppa, 1998.

Data yang dikemukakan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Suppa yang tersebar dalam sepuluh desa/kelurahan yang ada di dalamnya, dimana diantara kesepuluh desa/kelurahan tersebut yang mempunyai penduduk dan kepala keluarga paling banyak yaitu desa Lero, kemudian yang paling terkecil penduduknya yaitu desa Ujung Labuang.

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia pada umumnya, begitu juga bagi penduduk yang ada dalam wilayah Kecamatan Suppa. Pentingnya faktor mata pencaharian ini, karena dengan

melalui faktor ini penduduk akan memperoleh suatu hasil yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, maupun kebutuhan masyarakat lainnya, baik kebutuhan yang bersifat materil, maupun kebutuhan non materil.

Sehubungan dengan pentingnya peranan mata pencaharian dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat, sehingga mata pencaharian itu sendiri telah menjadi pula suatu kebutuhan yang sering dirasakan mendesak pemenuhannya, maka dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan hingga dewasa ini, termasuk dalam wilayah Kecamatan Suppa, Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang berada dalam usaha memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang ada secara terus menerus dilakukan.

Dengan memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja, khususnya pengangguran, disamping merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya yang bersangkutan dengan penghasilannya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, juga berarti ikut sertanya penduduk atau tenaga kerja tersebut dalam proses pembangunan, karena dengan bekerja berarti melakukan kegiatan produksi, baik berupa barang, maupun berupa jasa, yang diperlukan untuk pembangunan, termasuk jika tenaga kerja tersebut secara langsung mengerjakan proyek-proyek pembangunan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk membuka kesempatan kerja bagi penduduk desa.

Mata pencaharian penduduk bukan hanya diharapkan dalam satu bidang usaha tertentu, melainkan yang bersifat heterogen, karena dengan bermacam-macamnya lapangan usaha yang dilakukan penduduk, akan berarti terbukanya

kemungkinan yang luas bagi tersedianya berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh penduduk atau masyarakat itu sendiri.

Berbicara tentang corak atau jenis mata pencaharian penduduk, maka perlu dikemukakan bahwa corak atau jenis lapangan usaha atau mata pencaharian penduduk yang bersangkutan, misalnya suatu wilayah yang terletak jauh dari hutan, maka kondisi yang demikian memungkinkan banyaknya penduduk yang terjun disektor pertanian sebagai pencari kayu atau hasil hutan.

Keadaan seperti dikemukakan di atas antara lain dapat dilihat dari kenyataan di Kecamatan Suppa, dimana seperti telah dijelaskan dalam uraian yang lalu bahwa wilayah Kecamatan Suppa sebagian besar penduduk yang ada dalamnya, hidup disektor pertanian, utamanya sub sektor pertanian tanaman pangan, menyusul sektor perikanan yaitu pertambakan dan nelayan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 5
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
DI KECAMATAN SUPPA TAHUN 1998

No.	Mata Pencaharian/Bid. Usaha	Kepala Keluarga
1.	Pertanian	3.120
2.	Perikanan	2.240
3.	Peternakan	79
4.	Perdagangan	80
5.	Jasa Pemerintah	90
6.	Jasa-jasa	10
7.	Lain-lain	-
JUMLAH		5.629

Sumber Data : Kantor Kecamatan Suppa, 1998

pertumbuhan tanaman, maka berakibat gagalnya pertanian untuk memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Untuk lebih jelasnya uraian tentang kondisi areal pertanian yang ada dalam wilayah Kecamatan Suppa ini, perlu dikemukakan jenis dan luas lahan pertanian yang ada seperti dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 6
JENIS DAN LUAS AREAL LAHAN PERTANIAN
DI KECAMATAN SUPPA TAHUN 1998

No.	Lahan Sawah dan Kering	Luas (Ha)
1.	Sawah Pengairan Teknis	1.000
2.	Sawah Pengairan ½ Teknis	-
3.	Sawah Pengairan Sederhana (PU)	-
4.	Sawah Pengairan Non P.U	-
5.	Pekarangan	232
6.	Tegalan	1.988
7.	Sawah Tadah Hujan	518
8.	Ladang atau Huma	-
JUMLAH		3.738

Sumber Data : Kantor Kecamatan Suppa, 1998

Berdasarkan data yang dikemukakan di atas, maka nampak bahwa areal pertanian yang ada di kecamatan Suppa terdiri atas dua jenis yaitu lahan sawah dan lahan kering dengan luas seluruhnya yaitu 3.738 Ha.

Khusus lahan pertanian berupa sawah seperti di atas merupakan areal tanaman padi bagi petani, yang merupakan jenis tanaman utama dalam wilayah tersebut, namun bukanlah berarti bahwa penanaman padi hanya dilakukan pada areal

persawahan, melainkan juga pada bagian lahan kering yang ada merupakan areal pertanaman.

Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui tentang produksi padi di Kecamatan Suppa sebagai suatu daerah yang sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian dengan padi sebagai produksi yang utama, maka perlu dikemukakan data tentang produksi padi dalam wilayah tersebut, produksi dimaksud dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 7
PRODUKSI PADI DI KECAMATAN SUPPA

Tahun	Uraian	Produksi	
		Ton	Kwt/Ha
1998	- Padi Rendengan	-	-
	- Padi Gadu	-	-
	- Padi Sawah	8.862	5.681
	- Padi Ladang	-	-

Sumber data : Kantor Kecamatan Suppa, 1998

TABEL 8
KEADAAN LUAS PANEN PADI
TAHUN 1998 DI KECAMATAN SUPPA

No.	Jenis Padi	Luas Panen (Ha)
		1998
1.	Padi Rendengan	-
2.	Padi Gadu	-
3.	Padi Sawah	1.560
4.	Padi Ladang	-

Sumber Data : Kantor Kecamatan Suppa, 1998

Data yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa padi rendengan, padi gadu, padi ladang, tidak ditanam di Kecamatan Suppa, kecuali padi sawah yang mengalami peningkatan.

Selain tanaman padi yang merupakan tanaman pangan yang diusahakan oleh petani di Kecamatan Suppa, juga tanaman palawija turut pula mendapat perhatian. Perhatian dimaksud selain dibuktikan oleh adanya penanaman yang dilakukan para petani, juga dapat diketahui dari adanya peningkatan jumlah produksi dalam tahun 1998 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel yang dikemukakan sebagai berikut :

TABEL 9
PRODUKSI PALAWIJA TAHUN 1998
DI KECAMATAN SUPPA

No.	Jenis Palawija	Produksi (Ton)
		Tahun 1998
1.	Jagung	96
2.	Kacang Tanah	35
3.	Kacang Ijo	59
4.	Kedelai	188
5.	Ubi Kayu	3.021
6.	Ubi Jalar	287

Sumber data : Kantor Kecamatan Suppa, 1998

Dari data di atas terlihat bahwa hasil produksi palawija yang ada di kecamatan Suppa menghasilkan produksi yang cukup tinggi, sehingga dapat membantu terlaksananya proses pembangunan.

Berdasarkan uraian yang terdahulu, bahwa komposisi penduduk menurut mata pencaharian yang ada di Kecamatan Suppa, selain di sektor pertanian, juga perikanan tidak kalah pula produksinya. Adapun peningkatan produksi perikanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 10
PRODUKSI PERIKANAN MENURUT SUMBERNYA
DI KECAMATAM SUPPA

Sektor Perikanan	Produksi		Jumlah (ton)
	Udang (ton)	Ikan (ton)	
1. Laut	-	3.864,4	3.864,4
2. Darat			
a. Tambak	758,5	1.246,8	2.005,3
b. Kolam	-	4,3	4,3
c. Sawah	-	0,4	0,4
d. Rawa	-	-	-
e. Sungai	-	0,8	0,8
Jumlah	758,5	5.116,7	5.875,2

Sumber Data : Dinas Perikanan Kecamatan

Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka kiranya cukup jelas tentang mata pencaharian penduduk Kecamatan Suppa, dimana sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian dan perikanan yang mulai menunjukkan prospek yang cukup baik.

3. Pendidikan

Selain mata pencaharian sebagai salah satu faktor yang sangat penting artinya bagi setiap manusia, pendidikan juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan mata pencaharian.

Pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia pada umumnya karena dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan tertentu merupakan sarana bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan pendidikan yang cukup, merupakan modal bagi setiap orang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, dan dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pentingnya pendidikan bagi setiap manusia pada umumnya, khususnya oleh bangsa Indonesia, sehingga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mempunyai tugas yang sangat penting seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk meningkatkan kecerdasan bangsa tersebut, telah dijabarkan pula dalam GBHN dan selanjutnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang didasarkan atas Instruksi Presiden dan sebagainya, seperti penyempurnaan kurikulum pendidikan, penyempurnaan bahan-bahan pelajaran, alat-alat praktikum, peningkatan kualitas guru, bujang sekolah dan penempatanya, serta berbagai kebijaksanaan lainnya.

Perhatian terhadap bidang-bidang pendidikan tersebut, bukan hanya pada suatu daerah atau wilayah tertentu, melainkan secara keseluruhan termasuk dalam wilayah Kecamatan Suppa Kabupeten Daerah Tingkat II Pinrang. Hal ini antara lain ditandai dengan pelaksanaan pembangunan sekolah-sekolah dan berbagai kebijaksanaan lainnya di bidang pendidikan seperti disebutkan di atas.

Usaha-usaha yang dilakukan ini tidak lain dimaksudkan agar upaya yang dilakukan itu benar-benar dapat mencapai sasaran, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti telah disebutkan di atas.

Kebijaksanaan untuk mengembangkan bidang pendidikan tersebut bukan hanya sekedar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa semata, melainkan diharapkan dengan pengetahuan yang dimilikinya diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara, apalagi jika dikaitkan dengan tugas nasional yang sangat penting dewasa ini, yaitu pembangunan.

Pembangunan harus ditingkatkan secara terus menerus, baik kegiatannya maupun hasil-hasilnya membutuhkan manusia Indonesia yang dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dalam pembangunan, baik fungsi penelitian, pelaksanaan, maupun berbagai fungsi lainnya yang diperlukan bagi kelancaran dan suksesnya pembangunan dalam berbagai bidang.

Salah satu faktor yang penting dalam usaha meningkatkan bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu berupa pembangunan sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah, sebagai wadah pendidikan formal yang sangat menentukan. Sekolah-sekolah yang dimaksud telah terdapat pula di Kecamatan Suppa, dengan jumlah dan jenis seperti dalam tabel berikut :

TABEL 11
JUMLAH SEKOLAH, MURID DAN GURU
DI KECAMATAN SUPPA TAHUN 1998

No.	Jenis Sekolah	Banyaknya			
		Sekolah	Kelas	Guru	Murid
1.	TK	5	6	50	91
2.	SD	17	103	124	2.135
3.	SMP	4	25	63	862
4.	SMU	1	9	37	250
5.	SMEA	-	-	-	-
6.	IBTIDAIYAH	1	7	10	434
7.	TSANA WIAH	1	5	8	107
8.	ALIAH	-	-	-	-
9.	PGSD	-	-	-	-

Sumber data : Kantor Kecamatan Suppa, 1998

Dari data yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan berupa sekolah yang ada di Kecamatan Suppa meliputi Sekolah Taman Kanak-kanak sampai SLTA yang kesemuanya telah berfungsi sebagai sarana pendidikan formal dalam wilayah bersangkutan.

4. Agama

Sebagai suatu negara berdasarkan Pancasila, faktor agama merupakan faktor yang menentukan dalam upaya pengamalan Pancasila, khususnya sila Pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila Ketuhanan Yang maha Esa merupakan dasar bagi setiap agama yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, untuk tumbuh dan berkembang atau dianut oleh

bangsa Indonesia sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang sejalan dengan baktekat pembangunan nasional. Ini berarti, Bangsa Indonesia memeluk agama yang Berketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupannya, yang menunjukkan bahwa faktor agama merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi Bangsa Indonesia.

Ajaran yang bertentangan dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia, sehingga dalam kenyataannya di Indonesia hanya terdapat agama-agama yang sesuai dengan ajaran Pancasila, seperti agama Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan sebagainya.

Hal seperti ini juga sejalan dengan kenyataan di Kecamatan Suppa, yang menunjukkan adanya beberapa agama yang dianut oleh penduduk dalam wilayah yang bersangkutan. Kenyataan dimaksud dengan jelas dapat dilihat dalam tabel yang dikemukakan sebagai berikut :

TABEL 12
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT AGAMA
DI KECAMATAN SUPPA TAHUN 1998

No.	Agama	Jumlah Pemeluk / Agama
1.	Islam	26.251
2.	Protestan	-
3.	Katolik	12
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Lain-lain	315
	Jumlah	26.578

Sumber Data : Kantor Kecamatan Suppa, 1998

Berdasarkan data yang dikemukakan pada tabel di atas, nampak bahwa sebagian besar penduduk yang ada dalam wilayah Kecamatan Suppa memeluk agama Islam, yaitu sekitar 99 % dari jumlah penduduk seluruhnya. Sedangkan sebagian kecil memeluk agama Katolik dan beberapa agama lainnya.

Dengan adanya beberapa agama yang berkembang atau dipeluk oleh penduduk sesuai dengan ajaran Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, membuka kemungkinan yang lebih besar bagi terciptanya suatu kondisi kemasyarakatan sebagai mana yang diharapkan, kondisi kemasyarakatan yang dimaksud adalah terwujudnya keserasian dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat antara manusia dengan penciptanya atau Tuhannya. Keselarasan dan keseimbangan yang dimaksud pada dasarnya bagian dari makna pembangunan manusia Indonesia seutuhnya seperti yang dicantumkan dalam GBHN.

Untuk menjamin terlaksanannya ajaran-ajaran agama, maupun untuk peribadatan tertentu sebagai penunjang dalam mengamalkan ajaran agama yang bersangkutan, sarana peribadatan yang terdapat dan jumlahnya di Kecamatan Suppa dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 13
JENIS DAN JUMLAH TEMPAT PERIBADATAN
DI KECAMATAN SUPPA TAHUN 1998

No.	Jenis Tempat Peribadatan	Banyaknya
1.	Mesjid	24
2.	Langgar	4
3.	Gereja Protestan	-
4.	Gereja Katolik	-

Sumber Data : Kantor Kecamatan Suppa, 1998

Darai data tersebut di atas, diketahui bahwa bagi pemeluk agama Islam telah terdapat sejumlah tempat peribadatan untuk melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya. Sedangkan bagi pemeluk agama lainnya belum tersedia tempat peribadatan khusus, karena disebabkan jumlah pemeluk agama tersebut sangat sedikit jumlahnya dalam wilayah ini.

Dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka secara singkat telah dapat diketahui beberapa faktor yang berhubungan dengan potensi Wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pimrang, seperti beberapa aspek tentang demografinya, yang peranannya sangat penting dalam pembangunan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Desa

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air, terutama di daerah pedesaan, maka pemerintah sejak Replita I telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan mengenai program bantuan pembangunan desa yang diberikan kepada setiap desa/kelurahan, dengan tujuan agar desa tersebut dapat membangun desa dan masyarakatnya disesuaikan dengan potensi dan masalah yang dihadapi oleh desa/kelurahan yang bersangkutan.

Di Kecamatan Suppa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dikatakan dari tahun ketahun mengalami peningkatan, baik dari segi moril maupun materil untuk mencapai tujuan bersama.

Usaha untuk menggerakkan atau mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan penuh rasa tanggung jawab, karena tanpa keterlibatan masyarakat secara maksimal dalam pembangunan, maka pembangunan tidak mungkin berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini, pemerintah dalam kedudukannya sebagai motivator sangat menentukan.

Di Kecamatan Suppa, selain pemerintah sebagai motivator dalam penggerak partisipasi masyarakat, masyarakat di wilayah tersebut juga sudah menyadari dirinya untuk turut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, misalnya dengan melihat adanya kegiatan-kegiatan kerja bakti dan gotong royong masyarakat desa yang berada

di setiap desa di wilayah ini, yang mana dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela dengan penuh rasa kekeluargaan. Hal tersebut merupakan suatu sumbangan dalam daerah ini yang tak ternilai harganya, dan hasilnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Seperti perbaikan jalan lorong, perbaikan selokan, penataan pagar, merehabilitasi mesjid dan tempat-tempat ibadah serta pembuatan jembatan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya agar hubungan dapat berjalan dengan baik.

Tujuan pembangunan nasional di dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah lebih mendorong agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Meningkatkan partisipasi masyarakat adalah suatu usaha pendayagunaan daya, tenaga dan dana yang terkandung dalam masyarakat.

Dana, tenaga dan daya tersebut diproses dan diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan yang menjadi kebutuhan sendiri, baik usaha pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka kegiatan yang ada kaitannya dengan proyek pemerintah maupun inisiatif masyarakat itu sendiri yang berbentuk swadaya masyarakat.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan kerja bakti dan gotong royong dalam masyarakat di kecamatan Suppa Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ini, yang dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela dan penuh rasa kekeluargaan tersebut, merupakan suatu sumbangan dalam pembangunan daerah ini yang tidak ternilai harganya dan hasilnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Jika

kondisi yang demikian ini tetap dipelihara dan dibina, maka diharapkan pada tahun-tahun mendatang terdapat proyek-proyek yang lebih banyak lagi dananya bersumber dari swadaya murni masyarakat pedesaan, sehingga dapat hidup tenteram dan damai.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka sesuai dengan tanggapan responden partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

TABEL 14
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DESA

No.	Bentuk Partisipasi	Responden	Prosentase (%)
1.	Kesadaran sendiri	18	51,4
2.	Anjuran pemerintah	11	31,4
3.	Perintah atasan	4	11,4
4.	Paksaan	2	5,7
Jumlah		35	100,0

Sumber Data : Hasil Penelitian, Tahun 1998

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 35 daftar angket yang penulis edarkan, yang menjawab bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena didasarkan atas kesadaran sendiri, sebanyak 18 orang (51,4 %), menyusul karena anjuran pemerintah sebanyak 11 orang (31,4 %), karena perintah atasan sebanyak 4 orang (11,4%), sedangkan karena paksaan sebanyak 2 orang (5,7%).

Berdasarkan jawaban para responden tersebut, maka dapat diketahui pula bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didasarkan atas kesadaran

sendiri di daerah ini cukup tinggi. Dengan demikian, maka masyarakat di dalam wilayah kecamatan Suppa cukup membanggakan dan perlu dipelihara serta dilestarikan dari generasi ke generasi, sehingga pembangunan di segala bidang benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Di samping itu melalui pengamatan penulis pada tingkat yang paling bawah, cenderung menunggu perintah. Misalnya jika terjadi kerusakan-kerusakan bangunan (misalnya jembatan, jalanan dan lain-lain sebagainya), tidak pernah terlihat dengan kesadaran sendiri untuk memperbaikinya, melainkan menunggu perintah/instruksi dari pemerintah (kepala Desa/Lurah).

Begitulah kalau tanpa diikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang terjadi pengerahan tenaga berdasarkan perintah dari kepala desa atau Kelurahan, sehingga rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mengawasi hasil pembangunan kurang baik.

B. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Suppa, yaitu meliputi berbagai bentuk swadaya secara gotong royong yang pada dasarnya dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Swadaya dalam bentuk pemikiran
2. Swadaya dalam bentuk tenaga
3. Swadaya dalam bentuk uang
4. Swadaya dalam bentuk bahan dan barang

Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan tentang cara meningkatkan partisipasi masyarakat, akan tetapi perlu dipertanyakan kepada siapa yang perlu diajak berpartisipasi.

Namun demikian, berdasarkan pertimbangan ekonomis dan keperaktisan, maka cara untuk menimbulkan partisipasi ialah dengan mengetahui siapa yang perlu diperhatikan untuk diajak berpartisipasi. Selama ini partisipasi terutama diperlukan atau diperlakukan masukan dalam proses terjadinya pembangunan.

Partisipasi masyarakat tidak lain adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan baik dari segi moril maupun materil untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Di Kecamatan Suppa, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 4 desa /kelurahan yang telah diambil sebagai sampel/responden.

Pada umumnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Suppa diorganisir melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada di setiap desa/kelurahan. Melalui LKMD tingkat-tingkat swadaya masyarakat akan nampak atau nyata. Hal tersebut sesuai dengan ruang lingkup pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang bersifat fisik.

Adapun partisipasi masyarakat yang paling dominan dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Suppa, Kabupaten daerah tingkat dua Pinrang, ini dapat dilihat hasil angket/wawancara dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 15
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT
YANG MENONJOL DALAM PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN SUPPA

No.	Bentuk Partisipasi	Responden	Prosentase
1.	Uang	7	20
2.	Pikiran	8	23
3.	Tenaga	15	43
4.	Barang/bahan	5	14
Jumlah		35	100

Sumber data : Hasil Penelitian, tahun 1998

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa partisipasi yang dominan adalah dalam bentuk tenaga, yakni 15 orang atau 43%, menyusul dalam bentuk pikiran, yaitu 8 orang atau 23%, dan swadaya dalam bentuk barang/bahan yakni 5 orang atau 14%.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala wilayah kecamatan Suppa ini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk :

- Swadaya gotong royong fisik
- Membikin jalan-jalan desa atau jembatan
- Posyandu
- Penggalian selokan
- Mendukung peraturan pemerintah
- Melaksanakan peraturan pemerintah secara ikhlas (Drs. Muh. Amin Lanni) kepala wilayah kecamatan Suppa, Pinrang tanggal 10-1-1999)

Dana yang bersumber dari pemerintah dimaksudkan untuk memancing partisipasi pedesaan. Sedangkan dana yang bersumber dari swadaya masyarakat pedesaan merupakan salah satu wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan di seluruh kelurahan dan desa.

Partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan dewasa ini. Sedangkan dana bersumber dari swadaya masyarakat setempat. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka akan meningkatkan kegiatan usaha pembangunan, antara lain diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan terciptanya pembagian beban dan hasil pembangunan masyarakat. Adapun tanggapan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan daftar angket yang penulis edarkan yaitu 35 lembar, maka jawaban responden dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

TABEL 16
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

No.	Tanggapan	Responden	Presentase (%)
1.	Baik	15	43
2.	Cukup baik	11	37
3.	Rendah	6	14
4.	Sangat rendah	3	6
Jumlah		35	100

Sumber data : Hasil penelitian, tahun 1998

Berdasarkan tabel di atas, maka dapatlah diketahui bahwa jawaban responden yang mengatakan baik sebanyak 15 orang atau 43 % cukup baik sebanyak 11 orang atau 37 %, rendah sebanyak 6 orang atau 14 % sedangkan sangat rendah sebanyak 3 orang atau 6 %.

Dengan melihat penjelasan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Suppa cukup baik, yang merupakan modal utama yang tidak ternilai harganya di dalam memacu dan menunjukkan pembangunan di segala bidang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan pembangunan itu sendiri terarah kepada usaha meningkatkan taraf hidup dan memperluas lapangan kerja berarti perluasan partisipasi masyarakat.

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa tujuan pembangunan Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, untuk mencapai tujuan tersebut, maka bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan yang dicapai di wilayah Kecamatan Suppa karena animo atau kesadaran masyarakat ikut berpartisipasi aktif di dalam pembangunan di segala bidang. Ini dapat terbukti berdasarkan tanggapan masyarakat atau responden sesuai dengan daftar angket yang penulis edarkan kepada mereka yaitu sebanyak 35 angket. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 17
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG ANIMO MASYARAKAT
DALAM PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN

No.	Tanggapan	Responden	Prosentase
1.	Tinggi	12	32
2.	Cukup	5	15
3.	Sangat tinggi	4	12
4.	Sedang	11	32
5.	Rendah	3	9
Jumlah		35	100

Sumber data : Hasil penelitian, tahun 1998

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa animo masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan tinggi, yakni sebanyak 12 orang atau 32 %, menyusul cukup tinggi 5 orang atau 15 %, sangat tinggi sebanyak 4 orang atau 12 %, sedang 11 orang atau 32 %, kemudian yang berpendapat rendah sebanyak 3 orang atau 9 %.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa animo masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Suppa cukup tinggi. Kalau masyarakat sudah merasa bahwa pembangunan adalah miliknya, maka ia akan menjaga, memeliharanya, dan mengawasinya. Kalau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, maka masyarakat akan menegur, karena pembangunan adalah milik semua warga desa.

Adapun partisipasi berdasarkan keinginan/inisiatif dan tidak ada paksaan akan menghasilkan pembangunan berkualitas, menimbulkan rasa ikut memiliki atau rasa ikut bertanggung jawab dalam pembangunan.

C. Faktor-faktor yang Menghambat dan Pemecahannya dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Suppa, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 18

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

No.	Penghambat	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Kurangnya tenaga terampil	8	22,8
2.	Rendahnya tingkat kesadaran Masyarakat	10	28,5
3.	Sikap mental apatis	5	14,2
4.	Sikap mental loyal	5	14,2
5.	Budaya / adat istiadat	7	20,0
Jumlah		35	100,0

Sumber Data : Hasil Penelitian, 1998

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam peningkatan partisipasi masyarakat, yang paling dominan sesuai dengan jumlah responden dari 35 angket yang diedarkan, yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sebanyak 10 orang (28,5 %), menyusul kurangnya tenaga terampil yakni 8 orang (22,8 %), kemudian sikap mental yang

apatis sama banyaknya dengan sikap mental yang loyal yakni 5 orang (14,2 %), dan budaya/ adat istiadat sebanyak 7 orang (20 %).

Sesuai dengan data di atas, maka kita mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai tanggapan responden.

1. Rendahnya tingkat kesadaran sebagian anggota masyarakat

Sebagaimana uraian yang dijelaskan, bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh anggota masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat merupakan syarat mutlak demi suksesnya pembangunan, dengan kata lain bahwa tanpa partisipasi yang aktif dari masyarakat, maka pembangunan tidak mungkin dapat terlaksana atau mencapai hasil yang maksimal.

Kalau hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan di wilayah Kecamatan Suppa, masih terdapat sebagian kecil anggota masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang relatif rendah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“ Apabila dilihat daripada partisipasi masyarakat di daerah ini cukup baik, namun dibalik daripada itu masih ada saja diantara kelompok kecil masyarakat yang masih kurang menyadari tentang partisipasi masyarakat di segala bidang. “ (Syarifuddin, Tokoh Agama), Suppa 26-12-1998.

Dari wawancara tersebut di atas, maka dapat dimengerti bahwa masih ada diantara sekelompok kecil masyarakat yang belum menyadari tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sebagaimana telah diketahui pada pembahasan di atas, bahwa proses pelaksanaan pembangunan memerlukan waktu yang relatif lama, maka masyarakat dituntut untuk bersabar secara sukarela untuk memberikan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.

Hal ini jelas seperti yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat selaku responden yang mengatakan bahwa :

“Satu hal yang merupakan hambatan pelaksanaan pembangunan di desa yaitu adanya sejumlah anggota masyarakat yang sekalipun telah dinilai mampu untuk memberikan sumbangannya sepanjang tidak langsung dimana oleh petugas LKMD, yang diberi tugas untuk mengumpulkan swadaya masyarakat, keadaan seperti ini membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk terkumpulnya dana pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.” (Tokoh Tani, wawancara, Suppa 22 - 12 - 1998).

Jelas bahwa dengan adanya tingkat kesadaran yang relatif rendah merupakan salah satu hambatan.

2. *Kurangnya tenaga terampil*

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam rangka pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan perlu ditingkatkan, diperlukan tenaga yang terampil dalam melaksanakan berbagai fungsi dalam pembangunan tersebut, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, maupun bidang pengawasan.

Selain hal tersebut, dimaklumi pula bahwa pembangunan yang menginginkan hasil dalam bentuk material dan non materil, dalam hal ini terutama untuk peningkatan produksi sebagai syarat tercapainya produksi sebagaimana yang diharapkan.

Dengan kurangnya tenaga terampil di dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Suppa ini, merupakan salah satu faktor penghambat di dalam pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu responden menyatakan bahwa :

“ Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan terus menerus dan berkelanjutan dan ditingkatkan di wilayah Kecamatan Suppa sudah terlaksana, namun yang menjadi hambatan adalah masih kurangnya tenaga terampil dalam pelaksanaan pembangunan. “
(M. Ali Toaha, 25 Desember 1998) selaku tokoh pendidik.

3. *Sikap mental yang apatis*

Kesibukan dalam pekerjaannya menyebabkan masyarakat bersifat apatis dalam melaksanakan projek pembangunan daerah, yaitu masyarakat petani sibuk dengan pekerjaannya di sawah, di samping kesibukan-kesibukan diluar pekerjaan pokok. Masyarakat pengusaha sibuk dengan usahanya di samping sedikit sekali waktu terluang untuk istirahat di rumahnya. Masyarakat pegawai sibuk dengan pekerjaan di kantor, baik dalam bentuk pekerjaan dinas atau pekerjaan ekstra, seperti menghadiri pertemuan, organisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan keluarga, berolah raga dan sebagainya.

Kesibukan-kesibukan masyarakat dalam pekerjaannya menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pembangunan, dalam arti membangun fikiran,

sumbangan material dan yang hanya terdapat dalam masyarakat yakni sukar untuk memanfaatkan pembangunan daerah yang ada di desanya. Dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu responden yaitu tokoh agama mengatakan bahwa :

“Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan terus menerus dan berkelanjutan dan ditingkatkan di wilayah Kecamatan Suppa sudah terlaksana namun salah satu penghambatnya, yaitu adanya sikap mental yang apatis, maksudnya adanya sebagian masyarakat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, dimana selain pekerjaan pokok juga sibuk dengan pekerjaan sampingan, dengan demikian kesibukan masyarakat dengan pekerjaannya menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pembangunan.” (Tokoh Agama, wawancara, Suppa 23 - 12 - 1998)

Dengan demikian, jelas bahwa adanya sikap mental yang apatis dapat menghambat pelaksanaan pembangunan, yakni kesibukan masyarakat dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga sumbangan material yang ada tersedia dalam masyarakat, sukar untuk dimanfaatkan dalam pembangunan daerah yang ada di desanya.

4. *Sikap mental yang tidak loyal*

Sikap mental yang tidak loyal dalam masyarakat dikarenakan keluhan-keluhannya tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat.

5. *Budaya/Adat istiadat*

Dari beberapa hambatan yang telah dikemukakan di atas, masih ada hambatan lain yaitu budaya/adat istiadat yang dianut dalam masyarakat, yaitu adanya status sosial (bangsawan dan masyarakat biasa), dimana pada masyarakat

bangsawan kurang melibatkan tenaganya pada pelaksanaan pembangunan, karena menganggap dirinya lebih tinggi status sosialnya daripada masyarakat biasa.

D. Langkah-langkah yang Ditempuh Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Salah satu faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan desa adalah adanya swadaya gotong royong dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam usaha mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk dapat berswadaya dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Suppa telah ditempuh usaha-usaha antara lain :

1. Dengan memberikan pengertian dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti, tujuan dan manfaat daripada pembangunan, dengan memberi penjelasan bahwa pembangunan itu merupakan proses yang menghendaki adanya perubahan-perubahan, kondisi atau keadaan ke arah yang lebih baik dan mempunyai tujuan suatu masyarakat adil dan makmur di seluruh pelosok tanah air, terutama untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.
2. Membangun proyek pembangunan desa yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola masyarakat dengan swadaya masyarakat, baik yang bersifat materi maupun yang berupa tenaga kerja.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pemecahan faktor penghambat seperti yang diuraikan tadi, antara lain :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat II Pinrang dalam penyusunan anggaran pembangunan dapat menyediakan dana yang dimaksud untuk menyelenggarakan usaha peningkatan keterampilan penduduk di desa.
- b. Upaya peningkatan kesadaran sebagian anggota masyarakat desa (LKMD) dan tokoh masyarakat lainnya secara terus menerus dengan berusaha melalui berbagai upaya seperti ceramah, penyuluhan, baik pada tempat-tempat ibadah, maupun melalui sarana/wadah lainnya, sehingga masyarakat pada akhirnya dapat semakin sadar dan berpartisipasi secara aktif dan maksimal yang merupakan syarat suksesnya pembangunan.
- c. Sikap mental yang apatis diusahakan menjadi sikap mental yang sosial, yaitu dengan jalan mengadakan pembagian kerja yang teratur, sehingga bagaimanapun kesibukan-kesibukan dalam pekerjaannya, dapat meluangkan waktu untuk melayani persoalan pelaksanaan proyek pembangunan daerah di desanya .
- d. Sikap mental yang tidak loyal
Sikap mental yang tidak loyal dalam masyarakat sedapat mungkin dihindarkan dengan mendengarkan keluhan-keluhan anggota masyarakat. Keterampilan kepala desa/kelurahan untuk berkonsultasi dikembangkan dengan memberikan argumentasi yang tepat mengenai keluhan-keluhan masyarakatnya.
- e. Sedapat mungkin bagi golongan bangsawan yang kurang melibatkan diri dalam pelaksanaan pembangunan, agar lebih menyumbangkan uang atau materi supaya ada keseimbangan dan rasa kebersamaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dari bab ke bab, maka tibalah pada bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan sehubungan dengan pembahasan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Bentuk partisipasi dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Suppa menunjukkan bahwa partisipasi berupa tenaga termasuk kategori yang paling menonjol, sedangkan partisipasi dalam bentuk bahan/barang dan uang termasuk kategori yang kurang.
2. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Suppa, maka hasil-hasilnya sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Adapun hasil-hasil pembangunan di wilayah Kecamatan Suppa yang telah dicapai dengan partisipasi masyarakat adalah :

- Pembangunan Mesjid/rehabilitasi mesjid dan Mushallah.
 - Pembangunan jembatan dan perbaikan jalanan besar dan kecil, serta penataan pagar.
3. Bahwa berhasilnya pembangunan di segala bidang sangat ditentukan oleh adanya korelasi antara kedua kemampuan yaitu masyarakat dan pemerintah, oleh sebab itu pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan untuk merangsang partisipasi

masyarakat, sedangkan masyarakat berpartisipasi untuk memperlancar pembangunan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh berbagai unsur di daerah pedesaan, maka disarankan kepada para kepala desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Suppa, agar melakukan koordinasi dengan segenap aparat penyuluh yang bertugas dalam wilayahnya, kiranya memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan perlunya berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan, termasuk dalam proses mengumpulkan swadaya masyarakat untuk pembangunan.
2. Diharapkan pula agar pemerintah melibatkan atau mengikutsertakan secara langsung (rapat) dan memberikan tanggapannya dan saran-saran dalam ruang lingkup yang lebih luas, meminta informasi tentang segala sesuatu sebelum mengambil keputusan dalam perencanaan, dan menjelaskan tentang maksud dan tujuan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.
3. Disarankan pula agar masyarakat dapat memberikan dukungan atau partisipasi aktifnya terhadap segala perencanaan program pemerintah yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, DR., 1994. *Manajemen Penelitian*, CV. Haji Masagung.
- Badri, Sofyan, Drs., 1993. *Konsep Dasar Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Bina Aksara.
- Batten, R.T., 1996. *Pembangunan Masyarakat Desa*, Alumni, Bandung.
- Daldjoeni. N., 1982. *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*, Alumni Bandung.
- Djufrie Muh., 1997. *Perencanaan Pembangunan*, LAN-RI Perwakilan Sul-Sel.
- Hagul Peter, 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Handyaningrat Soearno, 1982. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hasan, Sadeli, 1981. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta : Departemen Transkopemade.
- Koentjaraningrat, 1986. *Masalah-masalah Pembangunan*, Jakarta, Bunga Rampai.
- Koentjaraningrat, 1981. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- K. Soekarno, *Dasar-dasar Manajemen*, Miswar Jakarta.
- Ndraha, Talizidhu, 1997. *Pengertian dan Pembangunan Desa*, Jakarta : Bina Aksara.
- Sagir Suharsono, 1982. *Kesempatan Kerja, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Manusia Seutuhnya*, Alumni, Bandung.
- Salim Emil, 1985. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- Schoorl, 1984. *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, Gramedia, Jakarta.
- Siagian, S. P. Dr. M. P. A., 1982. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung.

Soedjatmoko, 1986. *Dimensi-dimensi Manusia Dalam Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.

Soeroto, 1975. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. UGM, Yogyakarta.

Suryaningrat, Bayu. Drs., 1986. *Pemerintahan Administrasi dan Kelurahan*, Jakarta : Bina Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1987. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Iq3eS.

Vredembregt, J., 1987. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.

